BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sengketa kepulauan merupakan isu yang sering di dengar dalam dunia internasional yang dimana beberapa negara di dunia sering terjadi persengketaan dalam wilayah antar negara tetangganya. Hubungan internasional yang diadakan antarnegara, negara individu, atau dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Sering terjadi dalam hubungan itu menimbulkan sengketa di antara negara tersebut yang ditimbulkan seperti sengketa perbatasan, sumber daya alam dan kerusakan lingkungan.

Kedaulatan negara diartikan bahwa negara tersebut telah memiliki kemerdekaan dan adanya kedaulatan terhadap warga negaranya dalam urusan-urusan kenegaraan serta penjelasan dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Pengertian kedaulatan mengalami penyempitan makna yang pada awalnya kedaulatan haknya dimiliki oleh negara-negara merdeka yang ditandai dengan munculnya negara-negara nasionalis yang hanya mengenal kedaulatan dalam pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara yang telah berkembang menuju tidak adanya pembatasa-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindaknya, sehingga kedaulatan suatu negara dianggap sebagai sisa dari kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas-batas yang di tetapkan oleh hukum internasional (Rudy, 2006:27).

Sengketa kepulauan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok merupakan suatu fenomena dunia internasional khususnya wilayah Laut Tiongkok Timur yang sangat di kawatirkan akan terjadinya perang Sengketa kepulauan Senkaku (sebutan Jepang) atau Diaoyou (sebutan Tiongkok), konflik tersebut semakin memanas dalam situasi politik dan keamanan di wilayah Laut Tiongkok Timur. Masing-masing negara sudah melakukan sejumlah propaganda, manuver ataupun unjuk kekuatan militer terkait sengketa kepulauan yang diklaim banyak mengandung minyak dan gas bumi tersebut.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan sebuah kepulauan yang berada di Laut Tiongkok Timur, tepatnya berada pada sebelah timur Republik Rakyat Tiongkok (RRT), sebelah selatan Jepang, dan sebelah utara Taiwan. Berada pada 330 km dari Republik Rakyat Tiongkok, 170 km dari Pulau Ishigaki (Jepang), 410 km dari Okinawa Jepang 170 km dari Taiwan. Garis koordinat 25°47′53″ Lintang Utara dan 124°03′21″ Bujur Timur, kepulauan ini hanya memiliki luas 7 km2. Kepulauan Diaoyu atau Senkaku terdiri dari lima pulau besar (Diaoyu Dao atau Uotsuri Jima, Chiwei Yu atau Taisho Jima, Huangwei Yu atau Kuba Jima, Bei Xiaodao atau Kita Kojima dan Nan Xiaodao atau Minami Kojima) dan tiga karang (Bei Yan atau Kitaiwa, Nan Yan atau Minamiiwa dan Fei Jiao Yanatau Tobise) (http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/ senkaku/ Diakses pada 28 Februari 2015).

Sengketa antara Jepang dan Tiongkok tentang kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah berjalan lebih dari satu abad. Pada awal tahun (1894-1895) Kepulauan Senkaku/Diaoyu masih merupakan pulau yang tidak di miliki baik

Jepang maupun Tiongkok. Pada tahun 1895 peperangan antara Jepang dan Tiongkok terjadi dan kemenangan diperoleh Jepang atas Tiongkok pada 14 Januari 1895, dalam kekalahan Tiongkok tersebut maka Jepang secara resmi mengumumkan bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu milik Jepang (http://www. tribunnews.com/internasional/2012/11/20/ini-alasan-mengapa-jepang-lebih-berha k-atas-pulau-senkaku?page=3 / Diakses pada 30 April 2015).

Setelah beberapa tahun dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok pada tahun 1930-an pemerintah Jepang memperkenankan keluarga Tatsuhira Koga membeli dan mengelola Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Keluarga koga memanfaatkan kepulauan tersebut untuk mengumpulkan bulu elang dan untuk mengoprasikan pabrik pengelolaan bonito ikan tuna, kurang lebih ada 100 orang yang bekerja untuk pabrik yang dikelola oleh keluarga Tatsuhira Koga Keluarga Tatsuhira Koga pada tahun 1978 kepulauan yang dimiliki telah dijual kepada keluarga Kurihara dan semua yang bersangkutan tentang Kepulauan Senkaku/Diaoyu tanggungjawab Kurihara yang telah membeli kepulauan tersebut. (http://www.japanfocus.org/-fang-ming /3877/article.html / di akses pada 3 Mei 2015).

Perang Dunia II berakhir pada bulan Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Amerika dan wilayah jajahan Jepang dikembalikan kepada wilayahnya masing-masing, berdasarkan hasil dalam Perjanjian San Francisco Jepang menyerahkan kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada Amerika Serikat dan ditempatkan di bawah kekuasaan Amerika Serikat (http://ajw.asahi.com/article /special/senkaku_ history/AJ201212260101 / di akses pada 4 Mei 2015).

Pada 17 Juni 1971 Amerika Serikat melakukan perjanjian dengan Jepang bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu secara hak administratif ditetapkan milik Jepang. Dalam Sidang Keamanan PBB pada 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada Jepang. Dalam hal ini Pemerintah Tiongkok tidak menerima apa yang telah disepakati oleh pemerintah Jepang dengan Amerika Serikat dan menganggap Taiwan dan Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan wilayah Tiongkok (http://medan.tri bunnews.com/2015/05/06/inilah-pulau-yang-menjadi-sengketa-antara-china-dan-jepang / di akses pada 4 Mei 2015).

Jepang dan Tiongkok memiliki klaim yang berbeda atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Perbedaan klaim tersebut didasarkan pada pendekatan-pendekatan yang berfungsi untuk mendukung klaim atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, situasi yang berkembang saat ini telah menyebabkan ketegangan hubungan diplomatik yang merisaukan banyak pihak.

Pasca berakhir Perang Dunia II, sesuai dengan perjanjian San Francisco 28 April 1952, Jepang akan mengembalikan wilayah-wilayah jajahannya. Pada artikel kedua memang disebutkan bahwa Jepang akan mengembalikan wilayah Taiwan kepada Tiongkok, namun kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak tercantum di dalam perjanjiannya sehingga dalam hal ini Jepang merasa tidak harus mengembalikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada Tiongkok. Oleh karena itu menurut Jepang Kepulauan Senkaku/Diaoyu bukanlah bagian dari Taiwan yang harus dikembalikan, melainkan kepulauan yang telah menjadi bagian dari wilayah

Jepang sebelum peperangan antara Tiongkok dan Jepang terjadi (http://www. taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm / Diakses pada 5 Maret 2015).

Pada tanggal 8 Maret 1972 Kementerian Luar Negeri Jepang mengeluarkan pernyataan atas kepulauan Senkaku/Diaoyu bahwa Pulau-pulau tersebut milik pemerintahan Jepang. Dikatakan bahwa klaim Jepang atas Kepulauan Senkaku itu berdasarkan atas beberapa hal, antara lain adalah menurut Jepang secara hukum Jepang memiliki hak untuk menganggap dan menyatakan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai bagian dari wilayahnya, karena Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan Kepulauan yang berada dalam wilayah Jepang, karena Jepang telah meyakini bahwa secara hukum dia memiliki hak atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu, sehingga pendapat Jepang Kepulauan Senkaku/Diaoyu telah menjadi bagian dari wilayah Jepang dan bukan bagian dari wilayah Taiwan seperti yang dikatakan oleh Tiongkok.

Maka, Jepang akhirnya menganggap bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak pernah menjadi bagian dari perjanjian Shimonoseki maupun perjanjian San Francisco, Jepang juga meyakini bahwa dia telah menduduki dan mempunyai kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu dalam waktu yang lama, dan hal tersebut klaim Jepang merupakan suatu alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa Jepang telah memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang sah terhadap Kepulauan Senkaku/Diaoyu, pendapat Jepang dalam perjanjian San Francisco tidak secara spesifik menerangkan tentang keterlibatan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebagai salah satu bagian dari beberapa wilayah Jepang yang

akan diserahkan kepada Tiongkok (http:// www.globaltimes.cn/content/735266. shtml / Diakses 5 Maret 2015).

Mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, dalam sebuah wawancara dengan *Hong Kong Phoenix Television* berbicara bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dibawah kuasa Pemerintah Jepang berdasarkan Deklarasi Kairo 1943 yang dikeluarkan oleh pihak Sekutu. Hatoyama berpendapat bahwa tidak ada yang di persengketakan dalam kasus kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang di bicarakan oleh Tiongkok, karena Kepulauan Senkaku/Diaoyu tersebut sudah berada dalam wilayah Jepang dari tahun 1895 (http://www.japantimes.co. jp/news/2013/06/25/national/politics-diplomacy/chinas -senkaku-claim-has-basis-hatoyama/di akses pada 4 Mei 2015).

Dalam pernyataannya Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida periode 2012- sekarang, berpendapat pemerintah Tiongkok dalam situsnya mengeluarkan peta yang dimana Tiongkok pada tahun 1969 menyebut Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan masuk dalam wilayah Jepang. Kishida menambahkan bahwa pemerintah Tiongkok menerbitkan peta tersebut di internet untuk menunjukan bahwa klaim Tiongkok atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak memiliki landasan sama sekali. Pemerintah Jepang mengatakan bahwa Tiongkok mulai mengklaim kadaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk pertama kalinya pada tahun 1971 setelah laporan PBB pada tahun 1969 yang diidentifikasikan memiliki cadangan minyak dan gas (http://www.japantimes.co.jp/news/2015/03/17/national/politics-diplomacy/foreig

n-ministrys-1969-china-map-identifies-senkaku-islands-by-japanese-name/#VUv XVfDv_Dd / di akses pada 4 Mei 2015).

Dalam laporan PBB yang dimana Pemerintah Jepang bekerjasama dengan *United Nations Economic Commission for Asia and the Far East* (UNECAFE) untuk eksplorasi dasar laut yang dilakukan pada (1968-1969) yang menunjukkan bahwa di dasar laut Kepulauan Senkaku/Diaoyu terdapat kandungan minyak dan sumber daya hidrokarbon yang besar. Hidrokarbon berasal dari bahan fosil atau batu bara, miyak bumi dan gas dalam tingkat pengelolaannya berbeda (http://ajw .com/article/forum/security_and_territorial_issues/japan_china/AJ20112050001/ di akses pada 5 Mei 2015).

Kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan pusat sengketa kedaulatan antara Jepang dan Tiongkok, pada tahun 1970-an stabilitas regional dan hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok sepakat untuk mengesampingkan sengketa wilayah dalam Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu, tapi dalam pandangan Tiongkok pihak Jepang telah melanggar kesepakatan tersebut. Zhong Anzi, seorang peneliti dari Institut Studi Sejarah Modern di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok mengatakan bahwa dari sudut pandang manapun secara geografi, sejarah atau hukum Kepulauan Senkaku/Diaoyu milik Tiongkok. Klaim Jepang untuk Kepulauan Senkaku/Diaoyu berdasarkan pulau Ryuku yang mencakup pulau Okinawa.

Kepulauan Senkaku/Diaoyu menurut leluhur Tiongkok bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu ditemukan dan diberi nama “Diaoyutai” lebih awal dari apa yang di klaim Jepang. Nama “Diaoyutai” pertama kali muncul pada 1403 dalam buku

Tiongkok “Shun Feng Xiang”. dalam buku “Shi Liu Qiu Lu” oleh Chen kan tahun 1534, semua Kepulauan Senkaku/Dioayu telah diidentifikasi dan diberi nama. Dalam buku chen menjelaskan bukti Kepulauanan yang digunankan sebagai penanda navigasi selama pelayaran Tiongkok ke Ryukyu. Bahkan menurut catatan sejarah Kepulauan Senkaku/Diaoyu dianggap sebagai batas penting untuk pertahanan lepas pantai Tiongkok selama dinasti Ming dan Qing (1368-1911) (http://en/people.cn/200305/25/eng20030525_117192.shtml / diakses pada 4 Mei 2015).

Dalam website *The China Times* dipublikasikan oleh *French Daily Le Monde,* Kong Quan Duta Besar Tiongkok untuk Prancis mengatakan dalam sebuah artikel bahwa bukti sejarah menunjukan Kepulauan Senkaku/Dioayu milik Tiongkok. Banyak bukti sejarah termasuk sejumlah peta kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Prancis yang menunjukan bahwa, kepulauan Senkaku/Diaoyu merupakan bagian dari wilayah Tiongkok. Pemerintah Jepang seharusnya mengembalikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada Tiongkok setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Tiongkok membutuhkan lingkungan yang damai dan stabil untuk mengembangkan ekonomi karena Tiongkok merupakan negara ekonomi terbesar di Asia (http://www.thechinatimes.com/online/2012/10/5532.html / di akses pada 5 Mei 2015).

Pemerintah Tiongkok mengecam Jepang dalam klaim atas dokumen-dokumen yang membuktikan kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Juru bicara Kementrian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying menyatakan meskipun Jepang mencoba untuk mencari dokumen yang mendukung untuk klaim

kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu tidak pernah dapat mengubah fakta bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pemerintah Jepang telah mengumpulkan 500 dukumen yang menunjukan klaim Jepang atas kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu sebelum Perang Dunia II tetapi Hua mengatakan banyak fakta-fakta sejarah Tiongkok bahwa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang berdekatan dengan wilayah Tiongkok yang masuk dalam teritorial Taiwan (http://usa.chinadaily.com.cn/world/2015-04/09/content_20037228.htm / di akses pada 5 Mei 2015).

Dalam kantor berita Global Times *Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Repuplik of China* 10 September 2012 bahwa pada tanggal 10 September 2012 pemerintah Jepang mengumumkan pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan berafiliasi dengan Nan Bei Xiaodao dan pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu disebut sebagai nasionalisasi oleh pemerintah Jepang, ini merupakan pelanggaran berat bagi kedaulatan Tiongkok atas wilayahnya (http://www.globaltimes.cn/db/ goverment/1.shtml / di akses pada 3 Maret 2015).

Keluarga Kurihara yang memiliki empat pulau dari 5 Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang menjual Kepulauan tersebut mengatakan sebelumnya mereka hanya akan menjual Kepulauan Senkaku/Diaoyu kepada Pemerintah Tokyo tetapi Pemerintah Pusat Jepang berkeinginan untuk membeli Kepulauan tersebut untuk mengontrol segala aktivitas di Kepulauan Senkaku/Diaoyu (http://www.japantimes.co.jp/news/2012/08/27/national/government-offering-senkakus-owner-2-billion-for-contested-isles/#.VU3A-_Dv_Df /Diakses pada 6 Mei 2015).

Pemerintah Tiongkok sungguh-sungguh menyatakan bahwa apa yang disebut pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Pemerintah Jepang benar-benar ilegal dan tidak sah, bahkan pemerintah Tiongkok tidak akan diam kedaulatan teritorialnya dilanggar. Pihak Tiongkok sangat mendesak pihak Jepang untuk segera menghentikan semua tindakan yang dapat merusak kedaulatan teritorial Tiongkok (http://www.globaltimes.cn/content/732416.shtml Diakses 3 Maret 2015).

Jepang sampai saat ini juga masih mengklaim sebagai pemilik sah kepulauan yang diperebutkan tersebut, Tiongkok dalam hal ini telah mengambil sikap keras terhadap klaim Jepang atas kepulauan Senkaku/Diaoyu. Seperti dilansir oleh Tiongkok dalam Daily China "*Voices Protest to Japan Over Diaoyu Island:* 11 September 2012 juru bicara Departemen Pertahanan Tiongkok Geng Yansheng mengatakan Pemerintah Tiongkok benar-benar menentang langkah Pemerintahan Jepang untuk membeli kepulauan Senkaku/Diaoyu. Pemerintah Jepang secara terang-terangan pada tanggal 10 September untuk membeli kepulauan Senkaku/Diaoyu, tindakan ini menambah keburukan situasi kedaulatan di wilayah Laut Tiongkok Timur. Geng mengatakan tindakan pemerintah Jepang benar-benar ilegal dan tidak sah atas pembelian pulau-pulau tersebut, dan pemerintah Tiongkok akan menjaga kedaulatan atas wilayah bangsanya dan akan memperkuat angkatan bersenjata (http://usa.chinadaily.com.cn/china/201209/11 /content_157 51091.htm / Diakses pada 2 Maret 2015).

Masyarakat Tiongkok dalam hal ini atas apa yang Jepang lakukan setelah membeli Kepulauan Senkaku/Diaoyu. Maka, masyarakat Tiongkok melakukan

aksi protes anti-Jepang yang meluas di Tiongkok. Skala aksi demonstrasi kali ini merupakan yang terbesar sejak dua negara ini menormalisir hubungan diplomatiknya pada tahun 1972. Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut telah memaksa beberapa perusahaan milik Jepang di Tiongkok seperti Panasonic dan Canon untuk menghentikan operasi mereka, karena aksi-aksi tersebut diikuti pula dengan pengerusakan pada jaringan produksi dan juga serangan terhadap kepentingan usaha Jepang dalam protes anti-Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang berencana merelokasikan pabriknya ke luar Tiongkok. Kedua negara melakukan pembatalan peringatan 40 tahun hubungan diplomatik kedua negara, yang semestinya dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012 (http://www.bbc .co.uk/indonesia/ dunia/2012/09/120915_chineseantijapan.shtml Diakses 3 Maret 2015).

Tiongkok dalam aksinya melakukan pengiriman 50 militer patrolinya ke perairan Kepulauan Senkaku/Diaoyu pada Januari 2013 yang dimana kapal laut yang patroli tersebut mendekati kapal patroli Jepang yang berada berdekatan dengan wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu tersebut (http://ajw.asahi.com/article /asia/china/AJ201401170068 / di akses pada 5 Mei 2015).

Sementara itu dalam website pemerintahan Tiongkok *Ministry Of National Defense The People's Republic Of China* 1 Maret 2014 dalam wawancara dengan Xinhua pada sabtu, Yin Zhuo Direktur Konsultasi Komite Ahli PLA NAVY mengatakan belanja militer Tiongkok masih jauh dari tingkat yang dibutuhkan untuk menjadi seperti negara yang menghadapi tantangan keamanan yang semakin meluas di wilayah Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pada tahun 2013

menaikan anggaran pertahanan sebesar 10,7% (US$ 114,3 miliar) dari anggaran sebelumnya US$ 106,4 miliar pada tahun 2012, belanja militer akan digunakan untuk membuat angkatan bersenjata yang lebih dalam hal informasi berbasis teknologi dan menjaga keamanan nasional Tiongkok (http://eng.mod.gov.cn/ DefenseNews/2014-03/01/content_44937 83.htm Diakses pada 2 Maret 2015).

Merespon tindakan Jepang yang telah membeli Kepulauan Senkaku dan menganggap itu suatu yang ilegal, maka Tiongkok mengirimkan sejumlah kapal patroli ke wilayah sengketa sebagai bentuk penegasan atas kedaulatan negara. Ketegangan hubungan kedua negara meningkat drastis setelah mengirim dua kapal patrol ke wilayah pulau-pulau yang disengketakan dengan Jepang. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei "rencana Jepang untuk membeli Pulau-pulau benar-benar ilegal dan tidak sah, tidak dapat mengubah kenyataan bahwa Jepang berusaha untuk mencuri pulau-pulau yang ada di Laut Tiongkok Timur". Ketegangan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Jepang yang masih terus memburuk tersebut telah mendorong sejumlah pihak untuk bereaksi, di antaranya Amerika Serikat. Menteri pertahanan Amerika Serikat pada periode (2011-2013), Leon Edward Panetta mengunjungi Beijing untuk berbicara dengan Menteri Pertahanan Tiongkok dan para pemimpin negara itu. Ia menyerukan pentingnya hubungan militer yang lebih erat antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam kunjungannya ke Tokyo sebelumnya, Panetta memperingatkan bahwa konflik ini berpotensi untuk memburuk dan meminta kedua belah pihak agar menahan diri. Kedatangan Panetta juga menandai titik kritis dalam hubungan bilateral Tiongkok-Jepang akibat sengketa kepulauan

Diaoyu/Senkaku (http://www.bbc.com/news/world-asia-china-19632042/ Diakses 6 Maret 2015).

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pernyataannya mendesak Jepang agar menahan diri, setelah insiden yang bisa memicu konflik yang lebih terbuka. Jepang menuduh armada kapal perang Tiongkok membidikkan senjata mereka ke kapal dan helikopter *Japan Self-Defense Forces* (JSDF). Tindakan Tiongkok ini dianggap sebagai tindakan yang berbahaya, menimbulkan situasi yang tak terduga. Radar pembidik digunakan untuk menentukan lokasi target tembakan rudal atau perluru kendali. Mengarahkan radar ke satu target tertentu bisa dianggap sebagai suatu langkah sebelum mengeksekusi tembakan yang sesungguhnya, beberapa hari setelah pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping menyatakan komitmennya untuk membangun hubungan bilateral kedua negara. Insiden radar ini telah menjadi serentetan gesekan kecil di atas perairan yang disengketakan, sebelumnya banyak kapal-kapal nelayan Tiongkok yang mencoba memasuki wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu yang berakhir ditangkap oleh *Japan Coast Guard*, berlanjut dengan insiden perang air dan saling intai dengan kapal perang dan jet tempur kedua negara (http://www.solop os.com/tag /senkaku Diakses pada 2 Maret).

Kepulauan Senkaku/Diaoyu juga merupakan wilayah strategis bagi jalur perdagangan internasional, untuk itu tidaklah mengherankan baik Tiongkok atau Jepang terus menerus memodernisasi dan memperkuat aparat militernya untuk mengantisipasi jika terjadi perang, meningkatkan anggaran yang di keluarkan maka dapat menjadi perang diantara kedua negara. Menurut harian *Japan Times*

17 Desember 2013, PM Jepang Shinzo Abe memerintahkan untuk menaikkan belanja militernya pada 2013 sebesar US $ 2,4 milyar dari anggaran 2012, Shinzo Abe juga melakukan perubahan besar-besaran terhadap peralatan alutsista militernya yaitu 3 pesawat drone, 52 kendaraan amfibi, 17 pesawat transportasi osprey dan 5 kapal selam, semuanya dirancang untuk meningkatkan pengawasan maritime dan meningkatkan pertahanan di wilayah Pulau Senkaku (http://www. japantimes.co.jp/news/2013/12/17/national/defenseoutlaystobehiked5amid-china-threat/#.VR DM6o5pE4k Diakses pada 1 Maret).

Pada saat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berencana bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping disela pertemuan KTT Asia Pasifik untuk membahas sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu, pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang pertama antara kedua pemimpin negara tersebut. Dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan antara kedua negara yang dimana Tiongkok menuntut Pemerintah Jepang untuk mengakui atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu adalah milik Tiongkok dan secara teritorial tidak perlu dipertanyakan dan permintaan tersebut menjadi salah satu dari dua kondisi untuk pertemuan antara Shinzo Abe dan Xi Jinping. Sebelumnya kepala Sekertaris Kabinet Yoshihide Suga dalam konferensi pers menyatakan Jepang tidak akan membuat kompromi atau negosiasi atas isu-isu dalam kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan Tiongkok (http://www.japantimes.co.jp/news/2014/11/07/national/politics-diplomacy/tokyo-admits-differing-views-on-senkakus-opening-door-to-abe-xi-meeting./#.VU3K9PDv_Dd / Diakses pada 12 April 2015 07.30).

Dalam sebuah penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok dapat dilihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya yang diambil dalam karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang bersangkut paut dengan masalah yang diambil.

Dalam hal ini penelitian oleh Anugrah Hendri Rahmanto dalam E-Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, dengan judul *Sengketa Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang (1998-2013).* Dalam tulisan ini membahas bagaimana sejarah yang terjadi pada saat sengketa tersebut semenjak (1998-2013) dan pemberlakuan Zona Ekonomi Eksklusif untuk menyelesaikan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu, tetapi tidak membahas bagaimana respon Tiongkok terhadap pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang pada September 2012.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh Safril Hidayat dalam Jurnal Pertahanan Pamen Kostrad dengan Judul *Dampak Pemberlakuan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Cina Terhadap Keamanan Asia Pasifik.* Dalam penelitian ini membahas yang dimana pemberlakuan *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) oleh Tiongkok pada tanggal 23 November 2013 tidak hanya menimbulkan persoalan persengketaan dengan kedaulatan wilayah beberapa negara, namun juga menimbulkan akibat multilateralisasi keamanan di wilayah Asia Timur.

Dalam penelitian tersebut memperlihatkan bagaimana pemerintah Tiongkok dapat melakukan langkah-langkah *Identification of Friend or Foe* (IFF) dan *Visual Identification* (VID), sehingga memungkinkan Tiongkok untuk mengambil

tindakan militer atas obyek yang dianggap musuh. Sebagai tindakan Tiongkok tersebut, maka Jepang meningkatkan remiliterisasi pasukan beladirinya, sehingga pemerintah Jepang menaikan anggaran pertahanannya yang lebih besar. Peran yang dilakukan Jepang maupun Tiongkok sangat di pengaruhi kepentingan nasionalnya, dimana Jepang dan Tiongkok sangat memerlukan penguasaan atas wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu karena kekayaan sumber daya alamnya.

Penelitian oleh Zhu Liqun dalam jurnal *Institute for Security Studies China's Foreign Debates* dengan judul *Regional Order In East Asia.* Dalam penelitian ini yang dimana Tiongkok mendefinisikan dirinya sebagai kekuatan utama di Asia Timur, penelitian ini melihat perdebatan luas yang muncul mengenai status Tiongkok dan perannya di kawasan Asia Timur. Beberapa pengamat internasional berpendapat bahwa Tiongkok kemungkinan akan menjadi negara paling penting di kawasan Asia Pasifik dan memainkan peran sebagai *leader* dalam berkomunikasi dengan aktor diwilayah kawasan Asia Pasifik. Kurangnya konsensus di Asia Timur memberikan kesempatan bagi Amerika untuk terlibat dalam konflik di Asia Timur antara kekuatan-kekuatan utama di Asia Timur antara Jepang dan Tiongkok. Tetapi dengan meningkatnya kekuatan Tiongkok di kawasan Asia Timur tidak dapat digantikan oleh negara lain yaitu Rusia, Jepang, India atau Amerika Serikat.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti mengenai respos Tiongkok terhadap pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang serta mengetahui langkah-langkah yang di ambil oleh Jepang maupun Tiongkok dalam mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing. Dalam penelitian

ini, peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih dalam tentang penyelesaian sengketa antara Jepang dengan Tiongkok setelah pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang pada September 2012.

Berdasarkan penjabaran di atas, untuk itulah penelitian ini dilaksanakan, guna menjawab sederet pertanyaan dan akan menambah wawasan dalam studi ilmu hubungan internasional mengenai sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Tiongkok. Dalam skripsi ini, peneliti ingin meneliti lebih dalam yang akan tertuang dalam laporan penelitian berjudul :

“ Sengketa Jepang - Tiongkok Dalam Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu (2012-2014)”.

Penelitian ini berkaitan dengan beberapa mata kuliah pada studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yaitu :

1. Hubungan Internasional di Asia Timur, memberikan pengetahuan tentang berbagai situasi politik internasional baik yang berupa suatu konflik dalam sengketa pulau-pulau, ataupun kerjasama-kerjasama yang ada dalam wilayah Laut Tiongkok Timur.
2. Analisis Politik Luar Negeri, memberikan pemahaman mengenai penentuan Kebijakan Luar Negeri suatu negara, yang berelasi dengan konsep hubungan bilateral antara Jepang dan Tiongkok dalam permasalahan sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu.
3. Sistem Keamanan Internasional, memberikan pemahanan tentang bagaimana situasi keamanan yang ada dalam setiap situasi konflik politik

yang dimana ancaman sering sekali muncul dari luar seperti ancaman militer, politik, sosial, ekonomi di wilayah sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu.

4. Hukum Internasional, yang memberikan pemahaman atas aturan-aturan dalam laut teritorial suatu negara dengan batasan dan ketentuan yang berdasarkan aturan yang mutlak dan diakui secara internasional dalam sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang yang telah dipaparkan peneliti pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik perumusan permasalahan dari fenomena penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu yaitu sebagai berikut :

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu antara Pemerintah Jepang-Tiongkok?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana respon Tiongkok terhadap pembelian kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Jepang pada September 2012?

2. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Jepang dan Tiongkok untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu?
3. Bagaimana prospek penyelesaian sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu pasca pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Pemerintah Jepang pada September 2012?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditujukan untuk mempersempit fokus terhadap masalah. Dari situasi politik yang terjadi dalam wilayah Laut Tiongkok Timur merupakan suatu permasalahan yang panjang dalam beberapa dekade, mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah upaya Jepang dan Tiongkok dalam sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dari tahun (2012-2014). Pembatasan tahun ini diambil karena Jepang telah membeli Kepulauan Senkaku pada 10 September 2012 dari seorang pengusaha yang dimana Tiongkok bersikap keras terhadap pembelian kepulauan tersebut sehingga menciptakan ketegangan di wilayah kepulauan Senkaku/Diaoyu. Dari tahun (2012-2014) ini sudah banyak hal yang terjadi seperti aksi demonstrasi pada September 2012 di Tiongkok yang menyebabkan kerugian yang besar pada perusahaan Jepang yang berada di Tiongkok dan masyarakat Jepang melihat apa yang telah dilakukan masyarakat Tiongkok lalu melakukan hal yang sama dengan melakukan aksi di pusat kota. Pada Januari 2013 pengiriman kapal militer angkatan laut Tiongkok di wilayah Kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk melakukan

patroli yang dapat memberikan sinyal peperangan dengan Jepang. Pada awal tahun 2014 Pemerintah Tiongkok dan Jepang menaikan anggaran militernya untuk mengamankan kepentingan masing-masing dalam kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana proses yang telah diambil Jepang-Tiongkok dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu serta bagaimana upaya yang dilakukan Jepang-Tiongkok untuk mengurangi ketegangan yang ada dalam sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan pada:

1. Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat mengetahui dan memperdalam mengenai bagaimana respon Tiongkok terhadap pembelian kepulauan oleh pemerintah Jepang dalam sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu.
2. Mengetahui dan memahami langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Jepang dan Tiongkok untuk mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing dalam penyelesaian sengketa kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu.

3. Mengetahui dan memahami bagaimana prospek penyelesaian sengketa kepulauan yang terjadi pasca pembelian Kepulauan Senkaku/Diaoyu oleh Pemerintah Jepang pada September 2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk literatur dalam mengetahui penyelesaian sengketa kepulauan dengan teori-teori sengketa internasional sehingga menjadi bahan bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia terutama bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dalam studi kasus sengketa kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut Tiongkok Timur.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi dan studi empiris bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional khususnya dan diluar Program Studi tersebut pada umumnya, guna menaruh minat dalam memperdalam wawasan terhadap situasi konflik Laut Tiongkok Timur. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam studi kasus tentang konflik sengketa kepulauan Senkaku/Diaoyu untuk pemerintah Indonesia dalam membantu untuk menyelesaikan konflik sengketa kepulauan tersebut.